



LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 000.2.5/DKP-SEKR/XII/2024/127.5

Tanggal 31 Desember 2024

**PENGGUNA BARANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU**

**TAHUNAN
2024**



LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 000.2.5/DKP-SEKR/XII/2024/127.5

Tanggal 31 Desember 2024

**PENGGUNA BARANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU**

**TAHUNAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah menyelesaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahunan Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 230/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Demikian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, dalam melengkapi laporan keuangan di tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau secara keseluruhan, sehingga terwujudnya tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

H. YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710417 200212 1 006

DAFTAR ISI

Hal :

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I Dasar Hukum	vi
II Laporan BMD	viii
A Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	viii
B Laporan Barang Milik Daearah	viii
1. Aset Lancar	viii
2. Aset Tetap	ix
a Tanah	ix
b Peralatan dan Mesin	x
c Gedung dan Bangunan	xi
d Jalan, Irigasi dan Jaringan	xi
e Aset Tetap Lainnya	xi
f Konstruksi Dalam Pengerjaan	xii
3. Aset Lainnya	xii
a Hak Cipta	xii
b Aset Tak Berwujud	xii
	xii
III Kendala dan saran	xiii
A. Kendala	xiii
B. Saran	xiii
IV Penutup	xiv
Lampiran	xv
A. Daftar Pengadaan Barang	
B. Buku Barang Pakai Habis	
B1. Daftar Barang Persediaan Rusak Berat	

C.	Buku Barang Inventaris
D.	Buku Barang Aset Tak Berwujud
E.	Buku Barang Bukan Kategori Aset Tetap
	Form Perhitungan Rincian Kapitalisasi Belanja Barang (01)
F.	Daftar Rincian Barang Dibawah Nilai Kapitalisaasi
G.	Daftar Penerimaan Barang Dari Perolehan Lain
H.	Laporan Barang Persediaan
I.	Rekapitulasi Barang Persediaan
J.	Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan
	Form KertasKerja Utama Barang Persediaan (02.)
	Form Rekapitulasi Barang Pesediaan Perjenis (02.01)
	Form Barang Yang Diserahkan Pada Pihak Ketiga (02.02)
K.	Rekapitulasi Buku Inventaris
L.	Rekapitulasi Rincian Buku Inventaris
M.	Rekapitulasi Daftar Barang Intrakomptable
N.	Rekapitulasi Daftar Barang Ekstrakomptable
O.	Laporan Mutasi Barang
P.	Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang
Q.	Rincian Mutasi BMD Antar Pengguna Barang
R.	Rincian Reklasifikasi Antar Jenis Aset
S.	Rincian Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap
T.	Rincian Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
U.	Daftar Pemeliharaan Barang
V.	Buku Pemeliharaan Barang
W.	Daftar BMD Yang Bernilai Rp. 0,-dan/atau Rp. 1,-
X.	Daftar BMD Yang Tidak Di ketahui Tahun Perolehan
Y.	Revaluasi / Appraisal Terhadap BMD Bernilai Rp. 0,- / Rp. 1,- Dan tidak Diketahui Tahun Perolehan
Z.	Daftar Rincian Utang Atas Aset Tetap

Form Kertas Kerja Utama BMD (03)

Form Kertas Kerja Pendukung Tanah (03.01)
Form Kertas Kerja Pendukung Peralatan dan Mesin (03.02)
Form KertasKerja Pendukung Gedung dan Bangunan (03.03)
Form Kertas Kerja Pendukung Jalan, Irigasi dan Jaringan (03.04)
Form Kertas Kerja Pendukung Aset Tetap Lainnya (03.05)
Form Kertas Kerja Pendukung KDP Mutasi Tambah (03.06)
Form Kertas Kerja Pendukung KDP Mutasi Kurang (03.07)
AA. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
AB. Aset Tak Berwujud
AC. Aset Lain-Lain
AD. Daftar Barang Bukan Kategori Aset Tetap
AE. Daftar BMD Milik Pengguna Barang Lainnya
AF. Daftar BMD Yang Dipinjam pakaikan ke Instansi Lain
AG. Daftar BMD Yang Dihapuskan
AH. Daftar BMD Yang dikuasai Pihak Lain
AI. Daftar BMD Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
AJ. Daftar Barang Hasil Inventarisasi Yang Belum Tercatat Sebagai BMD
AK. Daftar Barang Yang Belum Memiliki Pengamanan Fisik dan Pengamanan Hukum
AL. Daftar Dokumen Kepemilikan BMD Yang Belum a.n. Pemerintah Provinsi Riau
AM. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Perangkat Daerah

BAB I

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 75);
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.790/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.522/V/2021 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.243/II/2021.
18. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 230/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

BAB II

LAPORAN BMD

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 479 Ayat 2 bahwa “Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 478 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Penyusunan Bahan Milik Daerah.”

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Daerah yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Barang Persediaan. Proses berawal dari penginputan data BMD di setiap UPT / Bidang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk barang persediaan.

Data BMD yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara Pengurus Barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMD perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan BPKAD Provinsi Riau setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan BPKAD Provinsi Riau diterbitkan Berita Acara Rekon (BAR) yang kemudian data (ADK Backup) Modul BMD Provinsi Riau dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi Modul BMD Provinsi Riau. Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan bagian BPKAD Provinsi Riau.

B. LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

1. Aset Lancar

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dineraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca. Nilai dalam neraca disajikan dihitung berdasarkan:

- a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp491.677.890. Aset lancar Tahunan Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan Aset lancar Tahunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp672.223.098,76. Adapun rincian aset lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Aset lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	Tahunan Th 2024	Tahunan Th 2023	Naik / Turun (Rp.)	%
BARANG PAKAI HABIS		491.677.890	672.223.098,76	(180.545.208,76)	26,85
a.	Bahan	107.116.875	136.562.947,7	(29.446.072,7)	
b.	Suku Cadang	-	-	-	
c.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	54.114.215	27.612.846,06	26.501.368,94	
d.	Obat-Obatan	9.500.000	12.374.280,00	(2.874.280,00)	
e.	Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	184.270.215	431.914.925,00	(247.644.710,00)	
f.	Natura dan Pakan	136.676.585	63.758.100,00	72.918.485,00	
g.	Persediaan Penelitian	-	-	-	
h.	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	
BARANG TAK HABIS PAKAI		-	-	-	
a.	Komponen	-	-	-	
b.	Pipa	-	-	-	
BARANG BEKAS PAKAI		-	-	-	
a.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	
TOTAL		491.677.890	672.223.098,76	(180.545.208,76)	26,85

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari :

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- e) Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar. Aset tetap lainnya berupa ATR merupakan renovasi yang dilakukan oleh bukan pemilik aset. Terhadap ATR tersebut tidak dilakukan penyusutan apabila belanja untuk renovasi tidak menambah masa manfaat asset dan agar diserahterimakan kepada pemilik asset pada akhir periode akuntansi.

Aset tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp223.912.904.135,50 Aset tetap Tahunan Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan Aset tetap Tahunan Tahun Anggaran 2023 198.853.706.943,41 atau mengalami kenaikan sebesar 0,88%.

Total Nilai Aset/ BMD yang tercatat dilaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah dengan rincian sebagai berikut :

NAMA ASET	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik / Turun)	
			Rp	%
Tanah	23.541.277.000,00	23.541.277.000,00	-	
Peralatan dan Mesin	80.522.447.211,26	79.216.972.630,36	1.305.474.580,90	
Gedung dan Bangunan	76.590.088.066,18	60.190.417.243,45	16.399.670.822,73	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.405.038.982,14	34.373.160.501,60	8.031.878.480,54	
Aset Tetap Lainnya	-	99.750.000,00	(99.750.000,00)	
Konstruksi dalam Pengerjaan	854.052.875,92	1.432.129.568,00	(578.076.692,08)	
Total	223.912.904.135,50	185.689.060.231,39	38.223.843.904,11	

a. Tanah

Aset tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.541.277.000,00 sama dibandingkan aset tanah Tahunan Tahun Anggaran 2023 Rp23.541.277.000,00 tidak ada mengalami kenaikan sama dengan 0%.

Tanah alamat Jalan kedudukan tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terletak di :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah terletak di Jl. Pattimura No. 06 Kota Pekanbaru
2. Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium di BBI Sei Tibun Kab. Kampar
3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah terletak di Jl. TanjungBatu No. 75 di Kota Pekanbaru
4. Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium terterletak di Jl. Lingkar Danau Buatan Rumbai Kota Pekanbaru

5. Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium di Pulau Rupat (Rupat Utara) di Kab. Bengkalis
6. Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium di Dusun IV Kampung Sawah Desa Pulau Rambai Kabupaten Kampar.
7. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Pelabuhan PPI Kota Dumai alamat Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
8. Tanah Tambak Udang BAP Sei Suir di Jalan Pelabuhan Ujung RT 02/RW 02 Dusun III Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
10. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah alamat Jalan Yos Sudarso Gg. Pelabuhan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
11. Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan alamat Jalan Bunga No. 12 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.
12. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
13. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Parit Tengah Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Peralatan Mesin

Nilai Aset peralatan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp80.522.447.211,26 meningkat sebesar Rp1.305.474.580,90 dibanding Tahunan Tahun tahun 2023 sebesar Rp79.216.972.630,36.

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp76.590.088.066,18 meningkat sebesar Rp16.399.970.822,73 dibanding Tahunan Tahun 2023 sebesar Rp60.190.417.243,45.

d. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp42.405.038.982,14 meningkat sebesar Rp8.031.878.480,54 dibanding Tahunan Tahun 2023 sebesar Rp34.373.160.501,60.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 Nihil atau sebesar Rp0,00 menurun karena dikapitalisasikan ke bangunan induk sebesar Rp99.750.000,00.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp854.052.875,92 menurun sebesar Rp578.076.692,08 dibandingkan dengan Tahunan Tahun 2023 sebesar Rp1.432.129.568,00.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada Tahunan Tahun 2024 dengan jumlah nilai Rp 29.608.413.123,65 menurun sebesar Rp(1.367.158.568,20) dibandingkan Tahunan Tahun 2023 senilai Rp30.975.571.691,85 disebabkan ada pemindahtangankan penghapusan. Daftar Aset Lainnya sebagai berikut :

NAMA ASET LAINNYA	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik / Turun)	
			Rp	%
Aset tidak berwujud	727.526.855,00	248.778.500,00	478.748.355,00	
Aset Lain- lain	28.880.886.268,65	30.726.793.191,85	(1.845.906.923.20)	
Total	29.608.413.123,65	30.975.571.691,85	(1.367.158.568,20)	

BAB III

KENDALA DAN SARAN

A. KENDALA

Dalam proses penyusunan Laporan Barang Milik daerah Tahunan Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari - 31 Desember 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 230/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

Kendala penyusunan Laporan Barang Milik daerah Tahunan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu Pengurus Barang Pengguna dalam membuat Laporan BMD Tahunan menunggu hasil Rekap Laporan dari Pengurus Barang Pembantu di Unit Pelaksana Teknis dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan pada bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dan data yang diterima jika ada kesalahan maka perlu dikoreksi ulang dan disesuaikan dengan realisasi belanja yang sebenarnya sehingga bisa memperlambat penyelesaian Laporan BMD Tahunan 2024.

B. SARAN

Dalam proses penyelesaian laporan Barang Milik Daerah Provinsi Riau pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau disarankan Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan pada bidang-bidang dan UPT-UPT hendaknya menyampaikan Laporan BMD Tahunan sudah benar dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga proses pembuatan laporan Barang Milik Daerah Tahunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahunan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 230/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

Data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahunan Tahun 2024 sudah dilakukan namun masih ada kekurangan-kekurangan.

Dengan laporan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Riau.

Atas bantuan dan kerjasama dari semua Pengurus Barang Pembantu, Pengolah Data dan Informasi dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan serta semua Bapak/Ibu, Saudara/i dan rekan-rekan yang terlibat membantu Kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Desember 2024

 **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
PROVINSI RIAU 

 **H. YURNALIS, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19710417 200212 1 006